

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Anggaran atau *budget* adalah satu rencana kerja untuk suatu periode yang akan datang yang telah dinilai dengan uang. Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama satu periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dengan kata lain, anggaran (*budget*) merupakan rencana kegiatan suatu organisasi yang tertulis dan dinyatakan secara kuantitatif untuk periode tertentu dan biasanya dinyatakan dalam satuan uang serta barang dan jasa (Mardiasmo, 2009).

Anggaran Pemerintah adalah dokumen pemerintah yang menyajikan data penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk tahun finansial tertentu yang disetujui oleh legislator, diterima oleh Presiden dan disajikan oleh Menteri Keuangan. Dokumen ini memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran negara yang telah diantisipasi untuk tahun finansial yang sedang berjalan. Anggaran memiliki peran untuk mensejahterakan rakyat serta dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan (Amalia, 2022). Selain itu, anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dalam suatu lembaga baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan harus menyusun anggaran atau *budget* sebagai alat perencanaan dan pengendalian setiap kegiatannya. Kebijakan pemerintah secara fiskal tersebut tertuang dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) sebagaimana tertulis dalam makalah perekonomian Indonesia.

Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) sebagai alat untuk mendukung strategi pembangunan nasional yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat berjalan dengan efektif apabila didukung oleh penyerapan anggaran yang baik. Tujuan penyusunan APBN sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan sila ke-5 Pancasila dan UUD 1945. Glenn A. Welsch (2010) memberikan definisi anggaran belanja negara sebagai pedoman untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang termasuk belanja pegawai untuk jangka waktu tertentu, dan biasanya satu tahun mendatang. Tugas-tugas negara diselenggarakan demi kepentingan masyarakat (rakyat). Secara garis besar struktur APBN merupakan pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer (selisih pendapatan dan pengeluaran di luar bunga utang), surplus/defisit anggaran (selisih penerimaan dan pengeluaran),

serta pembiayaan di dalam maupun luar negeri. Belanja pemerintah pusat yang ada dalam struktur APBN kemudian dirinci menjadi beberapa jenis belanja dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN memainkan peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan nasional, terutama dalam meningkatkan dan memelihara kesejahteraan rakyat, serta mempengaruhi alokasi sumberdaya dalam perekonomian. Peningkatan porsi belanja pemerintah pusat dari tahun ke tahun tidak diimbangi dengan penyerapan anggaran yang maksimal, sedangkan penyerapan anggaran merupakan salah satu tolok ukur/indikator kinerja pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian.

Kinerja pemerintah merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan oleh organisasi. Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk melihat apakah yang direncanakan bisa di realisasikan/dijalankan dengan baik. Setiap awal tahun anggaran, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran satuan kerja menandatangani perjanjian kinerja instansi yang disetujui oleh Menteri Keuangan untuk mewujudkan kinerja pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam perjanjian kinerja, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berjanji untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran kinerja instansi dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab instansi yang

kemudian akan dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja tersebut. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 menyebutkan bahwa penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator atas evaluasi kinerja dalam aspek implementasi. Evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila terserap secara maksimal (Rerung, Karamoy, & Pontoh, 2017).

Menurut Halim (2014: 84), bahwa penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Secara lebih mudah, masyarakat umum menyebutnya pencairan anggaran. Serapan anggaran adalah besaran persentase realisasi atas anggaran belanja yang telah ditetapkan dan kemudian dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah/SKPD kepada DPRD/kepala daerah berupa laporan keuangan yang disebut laporan realisasi anggaran atau LRA (Abdullah & Nazry, 2015).

Permasalahan keterlambatan dan ketidakpastian penyerapan anggaran menyebabkan *opportunity cost* atas uang pemerintah. Keterlambatan dan ketidakpastian penyerapan anggaran berdampak pada tidak optimalnya usaha-usaha penempatan dan investasi kas pemerintah apabila terdapat kelebihan kas akibat meningkatnya penerimaan negara. Pemerintah tidak akan mengambil resiko melakukan investasi apabila terdapat ketidakpastian penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran juga akan mengalami keterlambatan bila perencanaan

kegiatan kurang matang dan pelaksanaan kegiatan dilakukan tidak sesuai perencanaannya. Perencanaan anggaran yang akurat akan memudahkan tahap pelaksanaan anggaran dan memungkinkan tercapainya target secara efektif. Sebaliknya, ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran mengakibatkan sulitnya pelaksanaan anggaran yang berdampak pada lambatnya proses penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran.

Fenomena yang terjadi saat ini yaitu pola belanja kementerian/lembaga dengan karakteristik penyerapan yang rendah di semester pertama dan menumpuk pada semester kedua dan bahkan di triwulan akhir tahun anggaran berjalan. Pola belanja tersebut terjadi baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan berdampak pada tidak efektifnya peran anggaran sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu permasalahan dalam penyerapan anggaran pemerintah adalah melesetnya target penyerapan anggaran terutama di semester I sehingga terjadi penumpukan belanja pemerintah di semester II. Sebagian besar Satuan Kerja (satker) sangat rendah tingkat penyerapan anggarannya di awal tahun anggaran, kemudian terjadi peningkatan pada awal semester berikutnya dan baru terjadi peningkatan secara signifikan di akhir semester. Padahal satuan kerja telah berkomitmen untuk merealisasikan anggaran secara merata sepanjang tahun sebagaimana terdapat dalam halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu Rencana Penarikan Dana (RPD). Pelaksanaan anggaran dengan pola penumpukan pencairan anggaran ini terjadi juga di berbagai satuan kerja tak terkecuali di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Penyerapan anggaran belanja di Politeknik Pertanian Negeri Kupang

pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memiliki pola penyerapan yang serupa yaitu menumpuk di pertengahan hingga akhir semester II. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.1. Padahal dalam perjanjian kinerja antara instansi pemerintah dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi maka pimpinan instansi berjanji untuk mewujudkan target kinerja dengan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan anggaran RKA-K/L minimal 93% dari target kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 1.1 Penyerapan Anggaran Politani Tahun Anggaran 2017 s/d 2021

Tahun	Semester	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi (%)
2017	I	39.659.451.000	17.287.659.095	43,59
	II	46.863.378.000	42.518.219.405	90,73
2018	I	45.437.881.000	19.601.930.478	43,14
	II	54.519.904.000	50.952.631.025	93,46
2019	I	53.372.852.000	19.231.741.815	36,03
	II	51.721.797.000	49.490.392.601	95,69
2020	I	61.804.131.000	19.929.749.932	32,25
	II	66.415.038.000	57.619.982.575	86,76
2021	I	70.837.482.000	25.984.286.483	36,68
	II	67.253.765.000	61.235.886.146	91,05

Sumber: diolah dari LRA Politani Negeri Kupang, Lampiran 3

Dalam Tabel 1.1 terlihat bahwa persentase realisasi pelaksanaan anggaran pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang tahun 2017 s.d 2021 yang memenuhi target kinerja anggaran adalah pada tahun 2018 yaitu 93.46 % dan tahun 2019 yaitu 95.69% sedangkan pada tahun 2017, tahun 2020 dan tahun 2021 tidak mencapai target kinerja dalam pelaksanaan anggaran. Hal ini dikarenakan di tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi *pandemic covid-19* dan *lockdown* sehingga pelaksanaan anggaran tidak dilakukan secara maksimal, dimana banyak kegiatan kemahasiswaan yang mengumpulkan massa tidak dapat berjalan dengan baik dan

juga kegiatan operasional perkantoran dilakukan dari rumah (*work from home*) serta banyak kegiatan pelatihan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Menurut Harahap (2020), faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran antara lain perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan administrasi dan kompetensi sumber daya manusia. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Hendris Herriyanto (2012) yang menunjukkan hasil bahwa perencanaan yang tidak matang mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Salwah (2019) yang menyatakan perencanaan anggaran berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan menurut Puluala (2021), faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran antara lain perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa.

Perencanaan menjadi faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran karena masih adanya anggapan bahwa tidak semua anggaran yang diusulkan akan disetujui, sehingga anggaran yang diusulkan lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memperhatikan kebutuhan riil di lapangan dan kemudahan dalam implementasinya. Perencanaan anggaran yang tidak akurat juga mengakibatkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dilakukan revisi sebelum pelaksanaan. Revisi DIPA tersebut menyebabkan jadwal kegiatan harus dilakukan penyesuaian, dan waktu pelaksanaan menjadi mundur. Kegiatan dan program juga belum dapat dilaksanakan sebelum persetujuan revisi DIPA disahkan, karena kegiatan dan program tersebut dapat dikategorikan belum ada alokasi anggaran.

Sesuai pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Administrasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Kementerian Keuangan mengungkapkan lambatnya proses pencairan anggaran untuk pembayaran proyek kepada kontraktor seringkali disebabkan oleh kesalahan prosedur yang dilakukan satuan kerja pemerintah (Harahap, 2020). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan pengertian administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintah.

Sebagaimana penelitian Nugroho dan Alfahrissi (2017) yang menunjukkan bahwa faktor perencanaan, faktor pelaksanaan anggaran, faktor sumber daya manusia, faktor pengadaan barang dan jasa serta faktor permasalahan kebijakan, kinerja, dan permasalahan koordinasi dengan instansi lain terbukti berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada satker. Sedangkan menurut penelitian Syahputra (2016) perubahan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perubahan anggaran berpengaruh positif, sementara sisa anggaran tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran. Selain itu hasil penelitian Salwah (2019) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh simultan yang signifikan

terhadap serapan anggaran SKPD, secara parsial variabel perencanaan anggaran berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran, sedangkan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Salah satu faktor yang menentukan manajemen keuangan yang baik adalah sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari bagaimana manusia sebagai tenaga kerja menggunakan potensi fisik dan psikis yang ia miliki secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi (lembaga). Fungsi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) diwujudkan melalui kegiatan pemerintah sebagai pengelola keuangan negara dalam penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien (Keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2003). Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan penganggaran terlihat pada fungsi manusia sebagai satuan kerja yang memiliki tugas salah satunya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa yang harus memahami dengan baik tata cara dan prosedur teknis pengadaan barang dan jasa. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriany (2014) menyimpulkan bahwa faktor sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran akhir tahun Kota Pekalongan tahun 2013. Dengan demikian, dapat diduga bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya

manusia. Permasalahan sumber daya manusia terkait erat dengan motivasi. Motivasi dapat berupa penghargaan dalam bentuk materi maupun immateri. Secara materi, imbalan yang diperoleh menjadi pejabat perbendaharaan dan panitia pengadaan barang/jasa kecil dibandingkan dengan resiko dan waktu yang habis tercurah (Herriyanto, 2012).

Faktor yang penting dalam penyerapan anggaran lainnya adalah pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Menurut Yuniarto (2013), pelaksanaan anggaran adalah tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat. Walaupun sudah direncanakan dengan baik tetapi dalam pelaksanaannya sering banyak kendala yang mengakibatkan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal maupun tidak sesuai dengan rencana sebelumnya sehingga penyerapan anggaran juga sangat mungkin akan tidak tepat waktu. Kendala yang sering terjadi adalah persoalan yang terjadi dalam internal satker, proses pengadaan barang/jasa dan mekanisme pembayaran (pencairan anggaran).

Uang Persediaan atau UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*). Penggantian Uang Persediaan atau yang lebih dikenal dengan GUP merupakan proses pengisian kembali uang persediaan (*revolving*) yang telah dibayarkan kepada yang berhak dan tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Ganti Uang Persediaan (GUP) juga merupakan

proses pertanggungjawaban transaksi belanja yang dilakukan dalam rentan waktu minimal sekali dalam sebulan. Dalam pelaksanaan pembayaran, GUP terdiri dari: (1) GUP Isi yaitu penggantian uang persediaan dengan mengisi kembali rekening bendahara pengeluaran sebesar nilai yang telah dipergunakan; (2) GUP Nihil yaitu penggantian uang persediaan tanpa mengisi kembali rekening bendahara. Pembayaran yang dilakukan bendahara dipertanggungjawabkan sebagai bentuk pembebanan atas belanja negara. Ketika GUP dilakukan lebih dari sekali dalam sebulan akan mempengaruhi penyerapan anggaran.

Perubahan lingkungan dan kebijakan selama pelaksanaan anggaran dalam periode anggaran berkenaan seringkali mengharuskan dilakukannya penyesuaian anggaran (*rebudgeting*) selama periode berjalan. Perubahan anggaran akan menyebabkan pencapaian atas target kinerja anggaran menjadi lebih baik (Anessi-Pessina, et al. 2012). Perubahan anggaran daerah dilakukan untuk tujuan menyesuaikan anggaran berjalan terhadap perubahan-perubahan terkini, termasuk perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari pemerintah pusat (Abdullah & Nazry, 2014). Menurut Annesi-Pessina, et al., (2012), *rebudgeting* adalah proses revisi yang dilakukan pemerintah dalam memperbaharui anggarannya dalam tahun fiskal pelaksanaannya, sehingga berpengaruh besar terhadap alokasi belanja baik di pusat maupun di daerah.

Menurut penelitian Nugroho (2017), variabel perencanaan, pelaksanaan anggaran dan koordinasi dengan instansi lain berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Perencanaan yang baik dan terarah terhadap suatu program/kegiatan akan berdampak pada suksesnya program/kegiatan yang akan dilaksanakan,

demikian pula koordinasi dengan instansi lain semakin baik maka semakin tinggi penyerapan anggaran sehingga pelaksanaan anggaran akan lebih terarah dan penyerapan anggaran menjadi optimal dan baik.

Menurut penelitian Kirnanda (2016), variabel perencanaan anggaran, sumber daya manusia, administrasi, uang persediaan/ganti uang persediaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari perkantoran harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, pencatatan administrasi yang baik dan sistematika serta didukung dalam anggaran. Untuk merealisasikan anggaran tersebut menggunakan uang persediaan maupun tambahan uang persediaan. Uang persediaan (UP) adalah uang muka kerja yang diberikan oleh KPPN kepada Satker, sedangkan tambahan uang persediaan (TUP) diberikan kepada satker karena keadaan mendesak atau dengan kata lain dana yang sangat dibutuhkan dalam jumlah besar dan tidak dapat dibiayai oleh UP/GUP.

Berbagai hal yang telah diuraikan terkait penyerapan anggaran, perencanaan anggaran, administrasi, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, uang persediaan/ganti uang persediaan dan perubahan anggaran menjadi dasar penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja dengan lokasi Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Harahap, et al., (2020) tetapi penulis menambahkan satu variabel sesuai penelitian Kirnanda (2016) dan satu variabel dari penelitian Ruhmaini, et al., (2017). Dengan demikian ada enam variabel yang

mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu perencanaan anggaran, administrasi, sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran, uang persediaan/ganti uang persediaan dan revisi/perubahan anggaran.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran variabel penyerapan anggaran, perencanaan anggaran, administrasi, sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran, uang persediaan/ganti uang persediaan dan revisi/perubahan anggaran pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang?
2. Apakah variabel perencanaan anggaran, administrasi, sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran, uang persediaan/ganti uang persediaan dan revisi/perubahan anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang?
3. Apakah variabel perencanaan anggaran, administrasi, sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran, uang persediaan/ganti uang persediaan dan revisi/perubahan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran variabel penyerapan anggaran, perencanaan anggaran, administrasi, sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran, uang

persediaan/ganti uang persediaan dan revisi/perubahan anggaran pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang.

2. Untuk mengetahui variabel perencanaan anggaran, administrasi, sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran, uang persediaan/ganti uang persediaan dan revisi/perubahan anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
3. Apakah variabel perencanaan anggaran, administrasi, sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran, uang persediaan/ganti uang persediaan dan revisi/perubahan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
2. Bagi dunia pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan agar dijadikan bahan pembelajaran untuk kemajuan pendidikan, serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.
3. Bagi satuan kerja, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan informasi dalam pengambilan kebijakan penganggaran dan pelaksanaan anggaran belanja sehingga penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan.